

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rpjpd dan rpjmd, serta tata cara perubahan rpjpd, rpjmd dan rkpd, serta dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah (rkpd) kabupaten sidenreng rappang tahun 2025, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja (renja) perangkat daerah tahun 2025.

Oleh karena itu dalam penyusunan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 berpedoman pada Perda Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023.

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2025 UPT RSUD Nene Mallomo dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dari Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibidang kesehatan, maka rencana kerja dan dokumen perencanaan lainnya tidak terlepas pula dari RPJP Bidang Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 496);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo;
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang;
20. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

22. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo adalah sebagai pedoman dan arah bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini mempunyai fungsi :

- a. sebagai acuan bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
- c. menjabarkan rencana strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2024
- d. sebagai bahan acuan dan panduan dalam penyusunan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. menjabarkan rencana strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2025;
- c. menjadi pedoman bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;
- d. menjadi acuan bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
- e. sebagai bahan acuan dan panduan dalam penyusunan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT RSUD Nene Mallomo;
- f. memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi tentang pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan renja rumah sakit, keterkaitan antara Renja

dengan dokumen RKPD, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan rumah sakit, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja rumah sakit.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja rumah sakit, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan rumah sakit berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memuat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit, isu-isu penting, hambatan yang

dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi serta SPM.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi kajian terhadap program/kegiatan, sumber usulan program/kegiatan, dan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi rumah sakit.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi

Berisi penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisi tujuan dan sasaran rencana kerja rumah sakit yang dirumuskan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra rumah sakit.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran Renja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Untuk memantapkan perencanaan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2024. Pada tahun 2023 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 78.284.278.000,- (tujuh puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Dengan alokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 70.988.074.100,- dan belanja modal sebesar Rp. 7.296.203.900,-. Realisasi anggaran untuk keseluruhan program tersebut adalah sebesar Rp. 77.868.382.275,- (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh lima rupiah) atau sebesar 99,47%.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo. Indikator Kinerjanya adalah persentase ketersediaan penunjang Urusan pemerintahan daerah dengan target program sebesar 100% .

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi fisik 100% dan realisasi kinerja 65%
- b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan realisasi fisik 100% dan realisasi kinerja 51,67%.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dan bersifat rutin meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, realisasi fisik sebesar 100% dan realisas kinerja 100%.
- b. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan penyediaan jas komunikasi, sumber daya air dan listik, realisasi fisik sebesar 100% dan realisas kinerja 100% dan sub kegiatan penyediaan jasa peayanan umum kantor realisasi fisik sebesar 100% dan realisas kinerja 100%.
- c. peningkatan pelayanan BLUD dengan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD memiliki realisasi fisik 100% dan realisasi capaian kinerja 100%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja dari program ini adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar dengan target program 100%, relisasi fisik 100% dan realisasi kinerja 100%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut

a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan yaitu pengembangan rumah sakit dengan realisasi fisik 100% dan realisasi kinerja 100% .

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Surat Penyedia Dana (SPD) untuk kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah tidak tersedia dan anggaran yang terbatas untuk memenuhi kegiatan administrasi umum perangkat daerah. Serta

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul sekaitan dengan target capaian program renstra perangkat daerah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan
2. Meningkatkan kepuasan pasien

2.1.6. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Keseluruhan capaian Indikator Kinerja di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja output

yang dihasilkan rata-rata sebesar 81,48% dapat dikatakan dalam kategori berhasil. Oleh karenanya pencapaian kinerja output akan tetap dipertahankan, Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2023 pada Renstra Tahun 2018-2023 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program/kegiatan/sub kegiatan Renja tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4*100)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan, Layanan Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan Untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah								

		Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah/Kabupaten	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar								
1.02.02.2.0 1.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	-	-
1.02.02.2.0 1.13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-

1.02.02.2.0 1.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75 Unit	101 Unit	-	-	-	25 Unit	15 Unit	60%
1.02.02.1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Alat/Perangkat sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan								
1.02.02.1.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	129 Dokumen	-	-			4 Dokumen	1 Dokumen	22%
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota								
1.02.03.1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya								

1.02.03.1.0 1.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	637 orang	-	-	-	-	627	7 Orang	11%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan								
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	810 org/bulan	558 org/bulan	293 Orang/Bulan	293 Orang/Bulan	100%	270 Orang/Bulan	270 Orang/Bulan	100%
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase								
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	5 Unit	-	-		-	-	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran								
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	100 Laporan	60 Laporan	18 Laporan	30%	70 Laporan	12 Laporan	100%

X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	23 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	23 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	41 Unit	30 Unit	17 Unit	73%	25 Unit	15 Unit	60%

X.XX.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	7 Unit	15 unit	7 Unit	47%	9 Unit	5 Unit	56%
X.XX.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%

Pelaksanaan Renja Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2024-2026 sehingga diharapkan capaian pelaksanaan Renja tahun 2025 semakin tinggi sehingga target Renstra bisa tercapai yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan, sasaran serta visi dan misi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yaitu “menjadikan rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan terbaik, aman, bermutu tinggi dan inovatif”.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yang merupakan salah satu unit pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan penyakit dengan peningkatan promosi hidup bersih dan sehat serta upaya peningkatan kesehatan lingkungan rumah sakit dan melaksanakan upaya rujukan. Untuk mengukur kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digunakan beberapa indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra menuju pencapaian visi dan misi rumah sakit. Kinerja rumah sakit dapat dinilai dari berbagai faktor antara lain tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan.

Adapun indikator kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT RSUD Nene Mallomo
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Memenuhi Standar	100		100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
	Nilai SAKIP			60	61	66	71	66,45	-	66	71	

Kinerja pelayanan harus ditingkatkan sehingga pencapaian visi dan misi dapat terwujud. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan pelanggan dan mencari pelanggan baru antara lain dengan melengkapi tenaga serta sarana dan prasarana, meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kemampuan SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan produk layanan unggulan rumah sakit, melakukan promosi, dan meningkatkan pendapatan rumah sakit.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja (performance) pelayanan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit.

Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas, diketahui bahwa pelayanan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategis yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut :

a. Strengths (Kekuatan)

1. Tersedianya lahan seluas 24,604 m²;
2. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
3. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit;
4. Dukungan stakeholder yang menjadikan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo sebagai SKPD unggulan pelayanan publik bidang kesehatan
5. Tersedianya 4 Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 1 Dokter Spesialis Anak, 2 Dokter Spesialis Bedah, 1 Dokter Spesialis Kulit, 1 Dokter Spesialis Jiwa, 1 Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, 1 Dokter Spesialis Mata, 1 Dokter Obygyn, 1 Dokter Spesialis Radiologi, 1 Dokter Spesialis THT-KL, 3 Dokter Gigi, 1 Dokter Spesialis patologi Klinis, 1 Dokter Spesilais Gizi Klinik.

b. Weakness (Kelemahan)

1. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
2. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
3. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan;
4. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor;
5. Masih terbatasnya anggaran untuk biaya operasional;
6. Sarana dan prasarana masih terbatas baik dari segi jumlah maupun persyaratan kelayakan;
7. Perilaku petugas yang kurang maksimal dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan SOP.

c. Opportunity (Peluang)

1. Beberapa trend pelayanan Rawat Jalan seperti *One Day Care*, *Day Surgery* ataupun *Intermediate Care* yang akan berkembang adalah:
 - a) Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis
 - b) sehingga pasien bebas memilih dokter;
 - c) Pelayanan dilakukan oleh satelit rawat jalan, *One Day Care*, *One Day Surgery*, dan *Intermediate Care* yang tersebar di wilayah rumah sakit;
 - d) Pelayanan akan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Klub Kesehatan, Praktek Dokter Umum, Perawat *Home Care* dan tenaga profesional lainnya.
2. Beberapa trend pelayanan Rawat Inap rumah sakit non pendidikan yang akan berkembang:
 - a) Efisiensi pelayanan dengan menurunkan lama hari rawat inap;
 - b) Berkembangnya pelayanan perawatan *Home Care*;
 - c) Program *Hospice* untuk pasien terminal yang minta dirawat di rumah yang akan dibantu oleh pekerja sosial dan profesional di bidang kesehatan;
 - d) Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan yang standar (Paket Pelayanan Esensial/PPE).
3. Beberapa trend pelayanan pemeriksaan diagnostik radiologi yang akan berkembang:
 - a) Teknologi digital akan berkembang dengan adanya *Computed Radiology* yang merubah gambaran analog menjadi gambar digital;
 - b) Efisiensi penggunaan film dengan satu lembar film diisi dengan beberapa gambar yang akan dicetak secara digital;
 - c) Hasil pemeriksaan bukan berupa negatif film, namun dalam bentuk *Compact Disc*;
 - d) Dokter praktek pribadi dan rumah sakit lain dapat

menerima gambar tersebut yang dikirim lewat intranet maupun internet.

4. Beberapa pelayanan farmasi rumah sakit terutama sistem logistik farmasi yang akan berkembang adalah:
 - a) Logistik rumah sakit menggunakan stok optimal, khususnya untuk item *fast moving*;
 - b) Logistik rumah sakit melaksanakan metode *Just in Time* (JIT), di mana rumah sakit tetap mempunyai *safety stock* untuk item *emergency* dan rutin;
 - c) Kontrak pengadaan logistik farmasi untuk jangka waktu tertentu;
 - d) *Supplier* farmasi menyediakan gudang obat di rumah sakit, yang siap memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam dengan kontrak sewa gudang untuk jangka waktu tertentu;
5. Penatalaksanaan pemberian obat mengacu pada formularium.

d. Threats (Ancaman)

- Daya saing rumah sakit lain yang semakin kompetitif.

Selain isu-isu di atas, ada beberapa isu-isu strategik mengenai pelayanan di rumah sakit yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas antara lain :

- a. Usaha perumahsakitakan akan semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha daerah dan nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia dengan diperlakukannya liberalisasi perdagangan di kawasan AFTA dan APEC. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Dengan begitu banyaknya pelaku usaha yang masuk membuat rumah sakit harus dapat "memanjakan"

pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatannya.

- b. Globalisasi Informasi, sangat memungkinkan informasi tentang produk jasa pelayanan Rumah Sakit dapat diakses melalui website, begitu pula tentang informasi-informasi terbaru di bidang kesehatan, serta keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sampai kejadian yang menyimpang dalam pelayanan kesehatan (malpraktek) sudah langsung dapat diakses melalui media internet, dan kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi konsumsi berita di seluruh wilayah Indonesia dengan sangat cepat. Oleh karena itu petugas rumah sakit seharusnya sangat berhati-hati didalam memberikan pelayanan kepada pasien serta harus sesuai dengan standar pelayanan serta kode etik kedokteran. Untuk itu perlu diterapkan dan disosialisasikan *hospital by law* rumah sakit sebagai payung hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit.
- c. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana diatur tentang :
 - Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
 - Rumah sakit yang didirikan Pemerintah Daerah harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasionalnya;
 - Jumlah dan jenis SDM harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS;
 - Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi minimal 3 (tiga) tahun sekali.

- d. Masih adanya kesenjangan rasio tenaga kesehatan dengan kebutuhan;
- e. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional RS;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis dasar, sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit kelas C;
- g. Keterbatasan dana subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda);
- h. Perubahan perilaku masyarakat yang akan mengakibatkan perubahan pola penyakit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2024-2026, juga sekaligus merupakan langkah lanjut untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit kedepannya. Rencana kerja ini akan menjadi bahan masukan untuk finalisasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Telaahan terhadap rancangan awal OPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja yang dipakai oleh OPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan hasil perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan terlihat bahwa pagu indikatif yang diberikan sudah bisa mengakomodir semua program di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo pada tahun 2025 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah: UPT RSUD NENE MALLOMO

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN				71.483.837.076,00					71.483.837.076,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Nene Mallo mo	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	71.483.837.076,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Nene Mallo mo	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	71.483.837.076,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Nene Mallo mo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	23.004.782.476	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Nene Mallo mo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	23.004.782.476	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/ Bulan	23.004.782.476	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/ Bulan	23.004.782.476	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	195.272.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	195.272.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	162.272.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	162.272.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	33.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	33.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.909.344.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Nene Mallom o	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.909.344.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.179.024.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.179.024.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.730.320.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.730.320.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	23.216.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Nene Mallom o	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	23.216.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	22.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	22.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	1.216.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	1.216.600	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	43.368.974.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Nene Mallom o	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	43.368.974.000	

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	43.368.974.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Nene Mallom o	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	43.368.974.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	RSUD Nene Mallo mo	Cakupan Fasilitas Pelayanan, Layanan Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan Untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	100%	3.475.000.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	RSUD Nene Mallom o	Cakupan Fasilitas Pelayanan, Layanan Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan Untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	100%	3.475.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prsarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSUD Nene Mallo mo	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	100%	3.200.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, Prsarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSUD Nene Mallom o	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	100%	3.200.000.000	

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1.100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1.100.000.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	1.100.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	1.100.000.000	

	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	1 Unit	1.100.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	1 Unit	1.100.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Pemenuhan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	100%	275.000.000,00	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	RSUD Nene Mallom o	Persentase Pemenuhan Alat/Perangka t Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	100%	275.000.000,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	43 Dokumen	275.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Nene Mallom o	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	43 Dokumen	275.000.000,00	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Nene Mallo mo	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	100%	726.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	RSUD Nene Mallo mo	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	100%	726.000.000,00	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	396.000.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	396.000.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	627 Orang	396.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	RSUD Nene Mallo mo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	627 Orang	396.000.000,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100%	330.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Nene Mallo mo	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100%	330.000.000,00	

	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Nene Mallomo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	50 Orang	330.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Nene Mallomo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	330.000.000,00
	Total				75.702.589.076,00					75.702.589.076,00

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



drg. H. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19740715 200312 2 009

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. menambah jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit;
- b. memberikan pelayanan kesehatan prima pada masyarakat;
- c. melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit;
- d. melaksanakan *home visite* untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo.

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SKPD : UPT RSUD NENE MALLOMO

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



drg. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19740715 200312 2 009

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024

Dalam program pembangunan kesehatan, Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Standar Nasional maka seyogyanya semua Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten serta Rumah Sakit harus menjabarkan kembali Rencana Startegis Kementerian Kesehatan ini menjadi Rencana Strategis Rumah Sakit, tentunya disesuaikan dengan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi setempatnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo harus mampu menerjemahkan kebijakan politik Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra sebagai pijakan bagi perencanaan strategis di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut akan diuraikan tujuan dan sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang.

Tujuan dan sasaran yang disusun oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang. Adapun tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo

Tujuan renja merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan ini menggambarkan arah strategis yang digunakan untuk meletakkan

kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang ingin di capai UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan yang baik harus didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

b. Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusannya mengacu pada tugas dan fungsi rumah sakit sebagai perangkat daerah.

Agar pembangunan kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, maka sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

**Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang memenuhi standar	100%
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit	100%
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan	Nilai SAKIP	66

	Keuangan Rumah Sakit		
--	----------------------	--	--

3.3. Program dan Kegiatan

Pemberlakuan Menteri Dalam 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berimplikasi pada nomenklatur dan indikator output sub kegiatan yang disusun Pada Rencana Kerja Tahun 2024. Hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan UPT RSUD Nene Mallomo.

Pada tahun 2024, UPT RSUD Nene Mallomo akan melaksanakan 3 program dan 9 kegiatan. Program, Kegiatan dan sub kegiatan berikut pendanaannya dapat dilihat pada Tabel T-C 3.3.

TABEL T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	74.381.084.476			100%	74.381.084.476
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	UPT RSUD NENE MALLOMO	14 Bulan	23.004.782.476			14 Bulan	23.004.782.476
01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	UPT RSUD NENE MALLOMO	293 Orang/Bulan	23.004.782.476	APBD		293 Orang/Bulan	23.004.782.476
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	195.272.000			100%	195.272.000
01.1.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	UPT RSUD NENE MALLOMO	70 Laporan	162.272.000	APBD		70 Laporan	162.272.000
01.1.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	UPT RSUD NENE MALLOMO	12 Dokumen	33.000.000	APBD		12 Dokumen	33.000.000
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	100%	7.788.840.000			100%	7.788.840.000
01.1.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	UPT RSUD NENE MALLOMO	12 Laporan	2.712.840.000	APBD		12 Laporan	2.712.840.000
01.1.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	UPT RSUD NENE MALLOMO	12 Laporan	5.076.000.000	APBD		12 Laporan	5.076.000.000
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	23.216.000			100%	23.216.000
01.1.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	UPT RSUD NENE MALLOMO	25 Unit	22.000.000	APBD		25 Unit	22.000.000
01.1.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UPT RSUD NENE MALLOMO	9 Unit	1.216.000	APBD		9 Unit	1.216.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	43.368.974.000	BLUD		100%	43.368.974.000
01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan Rumah Sakit	UPT RSUD NENE MALLOMO	1 Unit Kerja	43.368.974.00			1 Unit Kerja	43.368.974.00
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	UPT RSUD NENE MALLOMO	96%	2.200.000.000			96%	2.200.000.000
1.02.02.1.01	Pengadaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	1.100.000.0000			100%	1.100.000.0000
1.02.02.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	UPT RSUD NENE MALLOMO	1 Unit	1.100.000.000	DAK		1 Unit	1.100.000.000
1.02.02.01.0013	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Diadakan	UPT RSUD NENE MALLOMO	25 Unit	1.100.000.0000			25 Unit	1.100.000.0000
1.02.02.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar tiap standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	UPT RSUD NENE MALLOMO	1 Unit	1.100.000.000	DAK		1 Unit	1.100.000.000
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Alat/Perangkat Sistem Informasi kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	321.280.400			100%	321.280.400
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	UPT RSUD NENE MALLOMO	1 Unit	321.280.400	DAK		1 Unit	321.280.400
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	726.000.000			100%	726.000.000
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	396.000.000			100%	396.000.000

1.02.03.1.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Kesehatan (Fasyankes)	UPT RSUD NENE MALLOMO	627 Orang	396.000.000	APBD		627 Orang	396.000.000
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	UPT RSUD NENE MALLOMO	100%	330.000.000			100%	330.000.000
1.02.03.1.01.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	UPT RSUD NENE MALLOMO	50 Orang	330.000.000	APBD		50 Orang	330.000.000
Total					77.582.084.476				74.363.443.476

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



drg. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19740715 200312 2 009

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam rencana kerja yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi rumah sakit.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana kerja (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel.4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.381.084.476
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.004.782.476
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.272.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.788.840.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.216.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	43.368.974.000
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.475.000.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten	2.200.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	275.000.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	726.000.000
	Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKM dan UKP Provinsi	396.000.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	330.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan dibuatnya Renja ini diupayakan agar UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang serta seluruh perangkat yang ada agar dapat melaksanakan tugas secara tepat, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak lain dalam rangka merespon permintaan masyarakat dan tidak ada henti-hentinya memberikan pelayanan secara prima.

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo secara simultan harus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan sehingga target kinerja dapat tercapai. Beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan dokter spesialis terutama dokter spesialis dasar yang belum tersedia sesuai standar rumah sakit kelas C;
2. Melengkapi kebutuhan tenaga paramedis profesional dan profesional non medis;
3. Melengkapi peralatan kesehatan dan obat-obatan serta bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan standar;
4. Mengembangkan kompetensi SDM tenaga kesehatan secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat;
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan*, *accountability system*, *supporting IT system* dan *standar operating procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit;

6. Optimalisasi pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku;

Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025. Dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana kerja ini dapat dilakukan upaya pengkajian dan bila perlu dapat dilakukan penyesuaian.

Hasil kinerja Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,



Dr. Hj. Sahriah Usman, Sp.KG

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19740715 200312 2 009